

KENAIKAN ANGGARAN MILITER DALAM KONTEKS KEMANUSIAAN

MODERN FACE IN HUMANITARIAN WORLD

Rifqi Itsnaini Yusuf
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Peradaban Bumiayu
rifqi.itsnaini@gmail.com

Abstract: This article aims to analyze the development of the increase in the country's military budget in the context of humanity and see it in a modern face of humanitarian world perspective. This article argues that there is a significant influence from the increase in the state's military budget on existing humanitarian issues. The increase in a country's military budget has at least two impacts, namely domestic and international impacts. Improving regional security and stability in the domestic context is one of the effects of an increase in a country's military budget. neighboring countries concerns over an increase in a country's budget reflects the adverse impact of the increase in the budget. The existence of these concerns will actually raise the tension of relations between countries that are in conflict. The conflict resulting from the increase in tension that is built will threaten existing humanitarian aspects

Key Words: Military, State, Humanitarian, Stability, Security.

Abstrak: Artikel ini membahas analisis perkembangan kenaikan anggaran militer negara dalam konteks kemanusiaan serta melihatnya dalam perspektif *modern face of humanitarian world*. Artikel ini berpendapat ada pengaruh yang signifikan dari kenaikan anggaran belanja militer negara terhadap isu-isu kemanusiaan yang ada. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan kajian literatur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta menganalisis berdasarkan data-data yang ada. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan anggaran militer suatu negara, setidaknya menimbulkan dua dampak, yaitu dampak domestik dan internasional. Pertama yaitu meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah dalam konteks dalam negeri. Kedua, kekhawatiran negara-negara tetangga atas kenaikan anggaran belanja suatu negara mencerminkan dampak buruk atas kenaikan anggaran belanja tersebut. Adanya kekhawatiran tersebut justru akan menaikkan tensi hubungan antar negara yang sedang berseteru. Konflik akibat dari kenaikan tensi yang dibangun tersebut akan mengancam aspek-aspek kemanusiaan yang ada.

Kata kunci: Militer, Negara, Humanitarian, Stabilitas, Keamanan.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia militer selalu menarik untuk diikuti, terutama yang menyangkut mengenai peta kekuatan militer negara-negara di dunia ini. Mengapa ini menarik tentu saja bisa kita perdebatkan, namun satu hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kekuatan militer negara-negara tersebut dapat menjadi tolak ukur kekuatan sebuah negara. Tentu saja banyak aspek-aspek lain di luar militer yang bisa dijadikan ukuran, namun peta kekuatan militer juga sangat perlu diperhatikan. Kekuatan militer

adalah gambaran paling jelas mengenai *power* suatu negara, dengan kata lain sebuah negara akan memiliki posisi tawar yang diperhitungkan jika memiliki pasukan militer yang kuat baik secara kualitas maupun kuantitas. Kesiap-siagaan suatu pasukan militer akan memberi makna aktual terhadap faktor-faktor geografi, sumber-sumber alam dan kemampuan industri yang dimiliki oleh suatu negara.

Dalam hubungan internasional, posisi militer juga mendapat tempat yang cukup penting. Posisi kekuatan militer sebuah negara

dapat dinggap sebuah bargaining point yang cukup diperhitungkan, seperti halnya Negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Russia menjadi poros kekuatan di dunia karena memiliki power atau kekuatan militer yang besar. Kemampuan atau kekuatan militer bisa dilihat juga dari alat kelengkapan militer yang dimiliki dalam mendukung suatu kebijakan luar negeri, dan kesemuanya tergantung dari inovasi teknologi, sosok pemimpin yang memimpin institusi militer, dan kuantitas serta kualitas dari angkatan bersenjata itu sendiri.

Suatu negara akan dipandang lemah secara militer meski memiliki teknologi dan kepemimpinan yang handal apabila tidak memiliki jumlah militer yang relatif besar, karena jumlah personel militer juga menjadi faktor penentu kekuatan angkatan bersenjata suatu negara. Setelah perang dunia II, persenjataan dalam dunia militer menjadi sangat berkembang dan memiliki kenaikan tingkat, baik dalam bidang jarak maupun jumlah korban yang ditimbulkan, yang luar biasa dibanding masa sebelumnya.

Dalam sejarah kehidupan manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema-tema utama dalam literatur-literatur politik dan hubungan internasional berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan *peace to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia. Hasil penelitian Zeev Maoz yang dikutip oleh Holsti (1992:351), menunjukkan bahwa sejak kongres Vienna 1815, hingga tahun 1976, telah terjadi 827 macam konflik, 210 diantaranya terjadi pada abad 19, dan 617 terjadi pada abad ke 20. Dalam buku sebelumnya, Holsti (1987: 590) juga memaparkan data yang dikuti dari Quincy Wright yang menyatakan perang di Negara-negara barat sejak tahun1480 hingga 1940 terjadi sebanyak 278 peristiwa. Menurut data di atas, dapat dikatakan bahwa masa yang cukup damai di dunia adalah pasca perang Napoleon sampai perang dunia pertama

Secara definitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan

eksklusif mereka mereka tidak dapat tercapai, kecuali melalui cara-cara kekerasan (Evans & Newnham, 1998: 565). Dalam arti luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan terror.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: pertama, mengapa kenaikan anggaran belanja militer sebuah negara mempunyai dampak terhadap kondisi stabilitas keamanan wilayah regional dan internasional, serta yang kedua, bagaimana perspektif humanitarian melihat kondisi tersebut dalam bingkai prespektif.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah guna melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan anggaran belanja militer sebuah negara sehingga berdampak terhadap kondisi stabilitas keamanan wilayah regional dan internasional, serta bagaimana perspektif humanitarian melihat kondisi tersebut dalam bingkai perspektif moder face of humanitarian world..

Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan jurnal ini antara lain: pertama kita bisa melihat sejauh mana kenaikan anggaran belanja militer di dunia yang cenderung naik setiap tahun dan dampaknya terhadap isu kemanusiaan. Kedua kita dapat melihat dan melakukan analisis serta perbandingan terhadap kebijakan –kebijakan militer negara– negara di dunia internasional terhadap isu-isu kemanusiaan yang muncul dalam perspektif yang baru.

LANDASAN TEORI

Dalam buku yang berjudul *Leviathan*, ada kekuasaan terbesar untuk kebahagiaan manusia adalah negara (*Leviathan*). Negara digambarkan sebagai sebuah monster yang mengerikan. Negara adalah wilayah manusia untuk menancapkan taring agar dapat bertahan di dalam kehidupan. Kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak dan sudah tentu semua manusia ingin memiliki terlepas dari akal budi manusia. Persaingan dalam perebutan kekuasaan menjadi hal yang wajar dan memang seharusnya seperti itu. Pemenang dalam persaingan tentu akan

mendapat kuasa untuk mengambil alih. Karena dalam hal ini perdamaian dan kebahagiaan manusia di dalam negara akan terjadi jika memiliki penguasa yang mutlak harus dipatuhi.

Leviathan adalah nama binatang di dalam mitologi Timur Tengah yang amat buas. Filosofi *Leviathan* ini yang dijadikan simbol suatu sistem negara. Maka dari itu negara atau pemimpin negara harus bertindak seperti *Leviathan* yang memiliki kuasa yang absolut. Mengadaptasi pemikiran Plato, menurut Hobbes sistem demokrasi hanya akan memecah belah negara dengan lahirnya kelompok – kelompok separatis dan menimbulkan terjadinya perang sipil. Lebih lanjut Hobbes mencontohkan kehancuran Athena disebabkan terbaginya kekuasaan dan tidak mutlakannya kekuasaan pemerintah. Sistem demokrasi hanya akan membagi-bagi kekuasaan yang nantinya terjadi pergulatan hanya dalam pemerintah itu sendiri dalam mengambil keputusan dikarenakan banyaknya oknum yang memiliki hak di dalamnya. Negara hanya layak dipimpin oleh satu orang dimana ia memiliki kekuasaan yang mutlak serta mencegah terjadinya kebijakan yang berubah-ubah demi keamanan setiap individu di dalam negaranya.

Hobbes mengibaratkan negara sebagai *Leviathan*, sejenis monster (makhluk raksasa) yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah perjanjian lama. Makhluk raksasa ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya. *Leviathan* tidak hanya ditakuti tapi juga di patuhi segala perintahnya. Hobbes menjuluki Negara kekuasaan (*machtsstaat*) sebagai *Leviathan*. Negara ini menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar hukum negara, Negara *Leviathan* tak segan-segan menjatuhkan vonis hukuman mati. Negara *Leviathan* harus kuat. Bila lemah akan timbul anarkhi, perang sipil mudah meletus dan dapat mengakibatkan kekuasaan terbelah. Menurut Hobbes keadaan yang berpotensi menimbulkan anarkhi dan perang didasarkan pada hakikat alamiah yang melekat pada diri manusia itulah yang melahirkan persaingan sesama manusia. Dalam usaha memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan diri, manusia akan berhadapan dengan manusia lain.

Hobbes berpendapat bahwa kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan, kekerasan menjadi alat yang ampuh yang sering digunakan dalam persaingan dan konflik itu. Secara alamiah

manusia akan memerangi manusia lain manusia akan menjadi serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Semua manusia akan berperang melawan semua (*bellum omnium contra omnes*). Keadaan ini menurut Thomas Hobbes menyadarkan manusia untuk melakukan antisipasi, bentuknya biasa bermacam macam. Di antara antisipasi terbaik adalah mempertahankan diri dengan menyerang cara menyerang orang lain, jadi menurut Hobbes bila ingin selamat harus agresif, menyerang orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain menyerang kita.

Perasaan yang paling kuat manusia adalah perasaan takut akan kematian dan hal ini diikuti keinginan untuk hidup lebih leluasa. Dengan perasaan ini mendorong manusia untuk mencari perdamaian, karena perang merupakan ancaman kehidupan serta kepemilikan materi individu. Perasaan ini mendorong manusia pada perdamaian yang memadai, di mana manusia bisa sampai persetujuan. Piranti ini dapat disebut hukum alam. Hukum alam sebagaimana didefinisikan oleh Thomas Hobbes adalah ketentuan atau peraturan umum, ditemukan oleh akal, yang dengannya akal itu manusia dilarang melakukan yang dapat merusak kehidupan, atau merampas sarana kelangsungan hidup orang lain. Manusia mempunyai hak alamiah untuk mencari apa saja yang akan memuaskan keinginannya. Thomas Hobbes berpendapat bahwa tiap-tiap orang bertindak untuk menyelamatkan apa saja yang dianggapnya sebagai kebaikan tertinggi dan menghindari bahaya yang ada pada waktu ia bertindak.

Teori Hukum Thomas Hobbes mempunyai alasan yang cukup mendasar. Sebagai Ilmuan yang terlibat langsung dalam berbagai pergolakan politik di negaranya dan merasakan pahit getirnya perang saudara dan perang agama. Pengalaman hidupnya yang membuat dia beranggapan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*) oleh karena itu Hobbes menjadi terobsesi untuk menemukan jawaban bagaimana menghindari perang dan konflik politik serta menciptakan perdamaian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan kajian literatur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta menganalisis berdasarkan data-data yang ada.

Pelaksanaan observasi secara tidak langsung juga dipakai untuk membantu penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dalam sejarah kehidupan manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema-tema utama dalam literatur-literatur politik dan hubungan internasional berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan *peace to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia. Hasil penelitian Zeev Maoz yang dikutip oleh Holsti (1992: 351), menunjukkan bahwa sejak kongres Vienna 1815, hingga tahun 1976, telah terjadi 827 macam konflik, 210 diantaranya terjadi pada abad 19, dan 617 terjadi pada abad ke 20. Dalam buku sebelumnya, Holsti (1987: 590) juga memaparkan data yang dikuti dari Quincy Wright yang menyatakan perang di Negara-negara barat sejak tahun 1480 hingga 1940 terjadi sebanyak 278 peristiwa. Menurut data di atas, dapat dikatakan bahwa masa yang cukup damai di dunia adalah pasca perang Napoleon sampai perang dunia pertama.

Kenaikan anggaran militer suatu negara, setidaknya menimbulkan dua dampak, yaitu dampak domestik dan internasional. Meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah dalam konteks dalam negeri merupakan salah satu dampak dari kenaikan anggaran militer sebuah Negara. Kekhawatiran negara-negara tetangga atas kenaikan anggaran belanja suatu negara mencerminkan dampak buruk atas kenaikan anggaran belanja tersebut. Adanya kekhawatiran tersebut justru akan menaikkan tensi hubungan antar Negara yang sedang berseteru. Dalam beberapa kasus, kenaikan anggaran militer ini adalah hasil alami pertumbuhan ekonomi atau respons terhadap kebutuhan keamanan yang sebenarnya. Pada kasus lain, ini mewakili pembelanjaan pendapatan dari sumber daya alam, dominansi rezim autokratik atau munculnya persaingan senjata regional (Hasi pemaparan Sam Perlo-Freeman, Direktur Program Pembelanjaan Militer Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dikutip dari AFP).

Menurut data SIPRI, dunia menghabiskan dana USD1,75 triliun (Rp20.055 triliun) pada 2013. Penurunan pembelanjaan militer itu dipimpin AS yang memangkas anggarannya hingga 7,8%. Washington adalah pembelanja

militer terbesar di dunia. Pemotongan dana ini adalah imbas dari berakhirnya perang di Irak, dimulainya penarikan pasukan dari Afghanistan, dan efek pemangkasan anggaran otomatis yang disepakati Kongres AS pada 2011.

Akan tetapi, tiga pembelanja besar berikutnya, China, Rusia, dan Arab Saudi menjadi bagian dari 23 negara di dunia yang melipatgandakan pembelanjaan militer mereka sejak 2004. Pada 2013, China meningkatkan dana mereka hingga 7,4% di saat sengketa wilayah di kawasan itu telah memicu negara tetangga meningkatkan anggaran militer mereka. Kekhawatiran Jepang atas kekuatan militer China dikombinasikan dengan kebijakan nasionalis Pemerintah Jepang telah membuat Jepang mengakhiri pemangkasan pembelanjaan militernya. Peningkatan terbesar di Asia pada 2013 justru dilakukan Afghanistan. Negara itu menaikkan anggaran pertahanannya hingga 77%. Peningkatan itu dilakukan di saat Kabul membangun pasukan keamanan sebagai persiapan penarikan sebagian besar tentara asing pada akhir 2014. Di Timur Tengah, pembelanjaan militer naik 4% dengan Arab Saudi memimpin kenaikan itu. Kerajaan itu berhasil melompati Inggris, Jepang, dan Prancis untuk menjadi pembelanja militer terbesar keempat di dunia. Ketegangan dengan Iran dan ketakutan terhadap revolusi ala *Arab Springs* di negara itu tampaknya menjadi faktor utama yang bisa menjelaskan mengapa Arab Saudi meningkatkan belanja militernya hingga 14%. Tapi, perkiraan belanja total Timur Tengah belum bisa dipastikan karena data dari Iran, Qatar, Suriah, dan Uni Emirat Arab pada 2013 tidak tersedia.

Istilah "*Arab Springs*" dipopulerkan oleh media Barat pada awal tahun 2011, ketika pemberontakan yang sukses di Tunisia terhadap mantan pemimpin Zine El Abidine Ben Ali berani protes anti-pemerintah yang sama di sebagian besar negara-negara Arab. Istilah itu mengacu pada gejolak di Eropa Timur pada tahun 1989, ketika rezim komunis tampaknya ditembus mulai jatuh di bawah tekanan dari protes populer massa dalam efek domino. Dalam waktu singkat, sebagian besar negara di bekas blok komunis mengadopsi sistem politik yang demokratis dengan ekonomi pasar. Namun peristiwa di Timur Tengah pergi ke arah yang kurang jelas. Mesir, Tunisia dan Yaman memasuki masa transisi yang tidak pasti, Suriah dan Libya terseret ke dalam konflik sipil, sedangkan kerajaan-kerajaan kaya di Teluk Persia sebagian

besar tetap tak tergoyahkan oleh peristiwa. Penggunaan istilah "*Arab Springs*" sejak saat itu telah dikritik karena tidak akurat dan sederhana.

Dalam pembahasan yang lain, kenaikan anggaran militer juga bisa disebabkan karena adanya pergolakan kawasan. Dalam kasus Arab Saudi, kenaikan anggarannya dipicu oleh adanya *Arab Springs* di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi juga merasa kedaulatannya sebagai negara terancam dengan adanya peristiwa tersebut. Otoritas tertinggi dengan suatu wilayah - dalam definisi ini, kedaulatan kemudian dapat dipahami lebih tepat hanya melalui sejarahnya. Sejarah ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari dua gerakan yang luas - yang pertama, evolusi panjang abad menuju benua Eropa, maka bola dunia, negara berdaulat, yang kedua, sebuah batasan dari hak prerogatif kedaulatan mutlak di paruh kedua abad kedua puluh. Sistem negara-negara berdaulat yang mendominasi Eropa pada Westphalia menyebar di seluruh dunia selama tiga abad berikutnya, yang berpuncak pada penurunan imperium kolonial Eropa di pertengahan abad ke-20, ketika negara menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan yang pernah mencakup seluruh tanah di permukaan dunia (Philpott, 2014). Hari ini, norma-norma kedaulatan termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pasal 2 (4) melarang serangan terhadap "kemerdekaan politik dan integritas teritorial," dan yang Pasal 2 (7) membatasi intervensi secara jelas.

Kedaulatan sebuah negara seringkali di tempatkan di atas kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal ini, negara wajib melindungi kedaulatan Negara dengan cara apapun. Termasuk melakukan kegiatan yang mengancam masyarakat negara tersebut dengan berbagai cara. Termasuk melakukan gerakan represif dan penanggulangan terhadap ancaman dalam bentuk apapun. Hanya sebuah praktek terhadap hak asasi manusia yang didukung oleh penegak militer atau prosedur peradilan yang kuat akan membatasi kedaulatan secara serius. Kemajuan dalam arah ini mulai terjadi setelah Perang Dingin melalui revisi bersejarah Perdamaian Westphalia, yang membatasi norma sangat maju dengan perjanjian yang non-intervensi. Dalam serangkaian beberapa episode awal pada tahun 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya telah mendukung tindakan politik, biasanya melibatkan kekuatan militer, bahwa konsensus yang luas dari negara-negara akan

sebelumnya dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal tidak sah. Episode melibatkan persetujuan operasi militer untuk memperbaiki ketidakadilan dalam batas-batas negara atau pemerintahan di luar urusan rumah tangga seperti operasi polisi (Philpott, 2014). Termasuk di dalamnya usaha meningkatkan kekuatan militer dalam upaya menjaga stabilitas sebuah Negara dan kawasan.

Penggunaan konsep *Responsibility to protect* juga bisa dimasukkan dalam kasus ini. ada sebuah panggilan untuk merevisi konsep kedaulatan sehingga memungkinkan untuk intervensi sanksi internasional muncul dengan *Responsibility to Protect* tersebut, dokumen tertulis dan dibuat pada tahun 2001 oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara, komisi bahwa Pemerintah Kanada diselenggarakan atas perintah dari Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Dokumen ini mengajukan revisi yang kuat dari konsepsi klasik dimana kedaulatan melibatkan "tanggung jawab untuk melindungi" pada bagian dari negara terhadap warganya sendiri, tanggung jawab yang oleh orang di luar negara tersebut mungkin menganggap ketika keadaan ketidakadilan yang besar berbahaya atau tidak dapat melindungi warga negaranya sendiri. *Responsibility to Protect* telah mengumpulkan perhatian internasional yang luas dan berfungsi sebagai manifesto untuk konsep kedaulatan yang non-mutlak dan bersyarat terhadap kewajiban luar.

Carl Schmitt (1985), filsuf berkebangsaan Jerman dalam bukunya *Theological Politics*, yang diterbitkan pada tahun 1922, dibuka dengan kalimat, "*sovereign is he who decides on the exceptions.*" Schmitt berpikir bahwa kedaulatan berada di atas hukum konstitusional dan harus dapat "membuat keputusan" atas nama baik dari negara selama masa darurat. Dia memiliki sedikit rasa hormat terhadap konstitusionalisme liberal, yang menurutnya sepenuhnya tidak memadai untuk menampung perebutan kekuasaan politik yang terlibat. Pada umumnya, ada sedikit yang menunjukkan bahwa, setidaknya dalam penelitian ini, Schmitt pikir penguasa terikat oleh hukum ilahi atau hukum alam. tersebut konstitusionalisme liberal dari Weimar Jerman adalah bagian utamanya bukti untuk keyakinan ini; selama tahun 1930-an ia sungguh-sungguh mendukung rezim Sosialis Nasional, salah satu yang darurat kekuatan hanya orang-orang yang dia pikir perlu.

Masyarakat menurut Schmitt (1999) adalah masyarakat yang membutuhkan pegangan ketika Chaos. Manusia digambarkan jahat dan berbahaya, namun dapat takut oleh otoritas (subjek) kedaulatan. Tindakan kekerasan itu bagai antinomi kawan dan lawan. Dengan konsep seperti ini, Schmitt beranggapan bahwa masyarakat yang berada dalam antinomi ini membutuhkan arah angin atau keputusan sang subjek. Keputusan yang akan membawa mereka pada kehidupan baru yang lepas dari yang sebelumnya. Namun masa ini tidaklah terjadi sekali sehingga subjek kedaulatan membutuhkan tindakan kekerasan untuk tetap bisa mempertahankan kedaulatannya atau dengan kata lain distingsi kawan dan lawan itu akan terjadi terus menerus.

Kekerasan dalam pengertian Schmitt hampir sama dengan pemahaman dari Hobbes. Hobbes dengan state of nature-nya memandang adanya konflik antar individu dikarenakan manusia yang dilahirkan jahat dan berbahaya. Manusia adalah makhluk yang berbahaya dan oleh karena itu haruslah dijinakan dengan sebuah tatanan hukum (Hobbes, T., & Gaskin, 1998). Oleh Schmitt pandangan ini diangkat dan disempurnakan bahwa kejahatan manusia harus dilunakkan lewat otoritas dan ancaman kekerasan. Namun, pandangan Schmitt dalam kekerasan ini tidaklah merupakan konflik antar pribadi dan kelompok melainkan konflik antar massa (*the social*). Kekerasan massa dalam *chaos* yang merupakan wujud dari keadaan darurat dapat diselesaikan oleh subjek kedaulatan dengan membuat suatu keputusan atau suatu bentuk kekerasan yang lain. Keputusan di sini mengatasi *chaos*, mengatasi situasi nol dan menjadi pangkal segalanya yang datang kemudian atau momen di mana kekerasan menemukan eksistensinya. Dengan adanya kekerasan maka yang politis menjadi ada dan tidak lagi terkubur oleh hukum yang birokratif dan administratif.

Melihat uraian Schmitt di atas yang merupakan ciri khas distingsi antara kawan dan lawan ternyata mampu menggerakkan tindakan kekerasan sang subjek kedaulatan. Hal ini kemudian bisa membenarkan praktek militerisme yang kerap terjadi dewasa ini. Di sini individu dimasukkan ke dalam kolektivitas dan kemudian kolektivitas itu diajak untuk melawan kolektivitas yang lain. Massa dimobilisasi melawan masa, individualitas tak ada lagi dan darah dijadikan lambang kekuatan kedaulatan. Suatu negara

mendeferensiasikan diri dari negara yang lain. Perdamaian antara kawan dan lawan tidak dinyatakan sebagai sebuah akhir yang abadi melainkan hanya suatu masa di mana di kemudian hari akan terjadi konflik kembali. Hal ini ditujukan untuk menciptakan krisis atau keadaan darurat sehingga sang subjek kedaulatan dapat membuat keputusan untuk mempertahankan kedaulatannya. Dalam pandangan ini, titik puncak politik agung merupakan momen terlihatnya lawan dalam segala kekonkretannya sebagai lawan dalam suatu tindakan kekerasan. Kekerasan tidak pernah lepas dari keputusan sang subjek kedaulatan. Keduanya berkerja bersama untuk menyelamatkan yang politis dan menempatkannya sesuai dengan martabatnya.

PENUTUP

Maslow (1968) berpendapat bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk tingkat yang paling rendah yaitu tingkat untuk bisa survive atau mempertahankan hidup dan rasa aman, dan ini adalah kebutuhan yang paling penting. Tetapi jika manusia secara fisik terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman, mereka akan distimuli untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai dan kebutuhan akan harga diri dalam kelompok mereka sendiri. Jika kebutuhan ini terpenuhi orang akan kembali mencari kebutuhan yang lebih tinggi lagi, prestasi intelektual, penghargaan estetis dan akhirnya *self-actualization*.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dalam penutup artikel ini bisa dijelaskan bahwa kenaikan anggaran militer suatu negara, setidaknya menimbulkan dua dampak, yaitu dampak domestik dan internasional. Pertama yaitu meningkatkan keamanan dan stabilitas wilayah dalam konteks dalam negeri. Kedua, kekhawatiran negara-negara tetangga atas kenaikan anggaran belanja suatu negara mencerminkan dampak buruk atas kenaikan anggaran belanja tersebut. Adanya kekhawatiran tersebut justru akan menaikkan tensi hubungan antar negara yang sedang berseteru. Konflik akibat dari kenaikan tensi yang dibangun tersebut akan mengancam aspek-aspek kemanusiaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Holsti. K. J. 1992. *International Politics. A framework for Analysis. 6th Ed.* New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Evans & Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations.* London. Penguins Books.
- Bloom, William. 1990. *Personal Identity, National Identity and International Relations.* Cambridge University Press.
- Dougherty, James E. & Robert I. Pfaltzgraff. Jr1981. *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey.* 2nd Edition. New York. Harper and Row Publisher.
- Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhose. *Contemporary Conflict Resolution.*
- Ambarwati. 2009. *Manusia dan Perang, dalam Hukum Humaniter Internasional dan Studi Hubungan Internasional.* Jakarta. Rajawali Press.
- Hobbes, T., & Gaskin, J. C. A. 1998. *Leviathan.* Oxford: Oxford University Press.
- Philpott, Dan. 2014. *Sovereignty.* The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer Edition), Edward N. Zalta (ed.)
- Schmitt, Carl. 1985. *Political Theology, Chicago:* The University of Chicago Press.
- Schmitt, Carl. 1999. *The concept of the Political,* Univ Press.
- Maslow, Abraham. 1968
- Janus and Minerva. 1987. *Essays in the Theory and Practice of International Politics.* Westview Press.
- Marshall, Catherine dan Gretchen B. Rossman. *Designing Qualitative Research: Second Edition.*
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tajuk Wacana Hrian Kompas Edisi Cetak tanggal 16 april 2014.

Artikel

- Jonathan Schanzer. *An Edge in The Dessert* Artikel. 2012
- Hasil pemaparan Sam Perlo-Freeman, Direktur Program Pembelanjaan Militer Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dikutip dari AFP.